

EFEKTIFITAS PERAN PENYULUH PADA PENDAMPINGAN PENERIMA PERSETUJUAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL DI UPTD KPH TERNATE-TIDORE (HKm Ake Guraci)

Effectiveness of Extension Workers in Assisting Recipients of Social Forestry Management Approval in UPTD KPH Ternate-Tidore (HKm Ake Guraci)

Fadli Muhidin^{1*}, Andy Kurniawan², Ramli Hadun²,
Aisjah Rahmawaty Ryadin², Buhari Umasugi³, Yusri Sapsuha⁴

¹Program Studi Magister Ilmu Pertanian, Pascasarjana, Universitas Khairun, Ternate, Indonesia

²Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Khairun, Ternate, Indonesia

³Program Studi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Khairun, Ternate, Indonesia

⁴Program Studi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Khairun, Ternate, Indonesia

*Corresponding author Email: fadlinona07@gmail.com

Received: 31 Desember 2024

Accepted: 22 Januari 2025

Available online: 22 Februari 2025

ABSTRACT

The role of forestry extension workers is crucial for the success of social forestry programs, particularly in empowering communities to manage forest resources sustainably. This study evaluates the effectiveness of forestry extension workers in assisting recipients of social forestry management approval in the HKm Ake Guraci group, focusing on their role as facilitators, educators, communicators, and motivators. Data was collected through interviews, surveys, and field observations. The effectiveness of assistance was evaluated based on three key areas: institutional management (82%), area management (80.2%), and business management (79.6%). Recommendations include improving document processing times, enhancing training, and strengthening marketing strategies for forest-based products.

Keywords: Effectiveness, Forestry, HKm Ake Guraci,

I. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki salah satu kawasan hutan terluas di dunia, yang berfungsi sebagai penyangga sistem kehidupan global. Negara ini dikenal sebagai "paru-paru dunia" karena luasnya kawasan hutan yang mencapai sepertiga dari total hutan dunia (KLHK, 2018). Hutan Indonesia tidak hanya menyimpan kekayaan hayati berupa flora dan fauna, tetapi juga berfungsi sebagai penyokong sistem kehidupan, seperti penyediaan oksigen dan pengaturan iklim. Namun, berbagai tekanan seperti deforestasi, illegal logging, dan konversi lahan menjadi tantangan serius yang mengancam keberlanjutan sumber daya ini (Fitria, 2017).

Sebagai negara kesejahteraan atau yang dalam konsep Hukum Administrasi Negara dikenal dengan istilah "welfare state," Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memanfaatkan

sumber daya hutan demi kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu "memajukan kesejahteraan umum." Dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki, termasuk hutan, pemerintah berwenang mengelola kekayaan ini untuk mendukung kehidupan masyarakat (Kaskoyo et al., 2014).

Di antara banyaknya tekanan tersebut, degradasi hutan di Pulau Jawa dan tantangan yang dihadapi di Maluku Utara menjadi bukti nyata pentingnya pendekatan berbasis masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah mengembangkan program Perhutanan Sosial sebagai solusi alternatif. Program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat lokal dalam mengelola hutan secara lestari, sembari meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.

DOI: <https://doi.org/10.33387/jpk.v4i1.9531>

Perhutanan Sosial dirancang sebagai kerangka kerja yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama pengelolaan hutan. Skema ini mencakup beberapa bentuk seperti Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan yang telah berpayung hukum melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016. Kebijakan ini menetapkan landasan hukum bagi masyarakat lokal untuk terlibat secara aktif dalam pengelolaan hutan negara melalui pemberian izin usaha kehutanan.

Gambaran lokasi penelitian di Kota Ternate memberikan konteks praktis tentang relevansi pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Kelompok Tani Hutan (KTH) Ake Guraci menjadi salah satu pelaksana skema Hutan Kemasyarakatan (HKm). Menurut Keputusan Walikota Ternate Nomor 140/II.11/KT/2014, Hutan Kemasyarakatan dalam Perhutanan Sosial KPH Ternate-Tidore telah diberikan izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan seluas ± 100 hektar. Pendampingan oleh penyuluh di wilayah ini mencakup penyusunan dokumen, pelatihan, dan fasilitasi pengelolaan hutan berbasis agroforestri (Dewi, 2017). Kebijakan ini dirancang untuk memperkuat tata kelola hutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung konservasi lingkungan melalui pendekatan berbasis komunitas. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas pada aspek kelola kelembagaan melalui penguatan struktur organisasi, kelola kawasan melalui rehabilitasi lahan, dan kelola usaha melalui diversifikasi produk hasil hutan.

Peran pendampingan oleh penyuluh kehutanan dalam program Perhutanan Sosial menjadi salah satu aspek kunci keberhasilan implementasi program ini. Penyuluh kehutanan tidak hanya berperan sebagai fasilitator yang memberikan pengetahuan teknis, tetapi juga sebagai motivator, edukator, dan mediator antara masyarakat dengan pihak eksternal (Suharti et al., 2017). Penyuluh harus memiliki pengetahuan mendalam mengenai teknik pengelolaan hutan, termasuk silvikultur, serta kemampuan untuk menyampaikan informasi secara efektif kepada masyarakat (Kartasapoetra, 2005). Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan program Perhutanan Sosial sangat dipengaruhi oleh keberhasilan penyuluh dalam mengelola hubungan antara masyarakat dan pihak terkait, seperti pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (Suwandi & Kartika, 2018).

Namun, meskipun peran penyuluh sangat vital, efektivitas pendampingan sering terhambat oleh kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pelatihan yang sesuai, serta keterbatasan infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekonomi berbasis hutan (Ahmad et al., 2021). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana peran penyuluh kehutanan dalam pendampingan di HKm Ake Guraci serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendampingan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas peran penyuluh kehutanan dalam pendampingan penerima persetujuan pengelolaan perhutanan sosial di kelompok HKm Ake Guraci, khususnya dalam tiga aspek

utama: pengelolaan kelembagaan, pengelolaan kawasan, dan pengelolaan usaha berbasis hutan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pendampingan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam implementasi program Perhutanan Sosial di masa depan.

II. Metode Penelitian

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kawasan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Ake Guraci, yang terletak di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ternate-Tidore, Provinsi Maluku Utara. Penelitian dimulai pada bulan Agustus 2024 dan berakhir pada Januari 2024, mencakup periode persiapan, pengolahan data, dan penyusunan laporan tesis.

Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

Kuisisioner: Digunakan untuk mengumpulkan data primer dari responden, dengan pertanyaan yang berfokus pada pengelolaan kelembagaan, pengelolaan kawasan, dan pengelolaan usaha berbasis hutan.

Alat Dokumentasi: Kamera dan alat perekam digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan lapangan dan wawancara dengan responden.

Wawancara Terstruktur: Dilakukan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai peran penyuluh kehutanan dan efektivitas pendampingan yang diberikan.

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian dimulai dengan studi pustaka untuk memahami teori-teori yang relevan dengan penelitian ini. Selanjutnya, dilakukan pengumpulan data melalui wawancara terstruktur dengan penyuluh kehutanan dan anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) Ake Guraci. Survei juga dilakukan dengan membagikan kuisisioner kepada 32 responden yang terlibat dalam program perhutanan sosial. Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk mengukur efektivitas peran penyuluh dalam pendampingan.

Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan dua metode:

Analisis Kualitatif: Digunakan untuk mengeksplorasi persepsi dan pengalaman responden terhadap peran penyuluh.

Analisis Kuantitatif: Menggunakan Skala Likert untuk mengukur efektivitas pendampingan pada tiga aspek utama. Hasil dari kuisisioner dikategorikan dalam lima tingkat skala (sangat setuju hingga sangat tidak setuju) untuk menentukan tingkat efektivitas.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelompok Tani Hutan (KTH) Ake Guraci, yang terletak di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ternate-Tidore, Provinsi Maluku Utara. Secara administratif, Kota Ternate berada di antara Pulau Ternate dan Pulau Tidore. Kawasan yang menjadi fokus penelitian adalah Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang diberikan

izin pengelolaan seluas 100 hektar berdasarkan Keputusan Walikota Ternate Nomor 140/II.11/KT/2014.

Peran Pendampingan Penyuluh Kehutanan

Penyuluh kehutanan memainkan peran penting dalam mendampingi kelompok tani hutan melalui tiga aspek utama: pengelolaan kelembagaan, pengelolaan kawasan, dan pengelolaan usaha berbasis hutan.

Pengelolaan Kelembagaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pendampingan penyuluh pada aspek pengelolaan kelembagaan memperoleh skor rata-rata 4,10 (sangat setuju). Penyuluh membantu kelompok dalam penyusunan dokumen RKPS (Rencana Kerja Pengelolaan Sosial) dan proposal bantuan dengan melibatkan anggota kelompok secara transparan dan partisipatif. Keterlibatan anggota kelompok dalam penyusunan dokumen sangat penting untuk menciptakan pemahaman bersama dan komitmen terhadap pengelolaan hutan. Hasil ini menunjukkan bahwa pendampingan pada pengelolaan kelembagaan sangat efektif, dengan indeks efektivitas sebesar 82%.

Pengelolaan Kawasan

Pada aspek pengelolaan kawasan, penelitian ini mencatatkan skor rata-rata 4,01. Penyuluh terlibat dalam kegiatan rehabilitasi lahan (RHL), seperti pemilihan bibit, penanaman, dan perawatan tanaman. Meskipun sebagian besar kegiatan rehabilitasi berhasil mencapai target, pemilihan bibit yang lebih beragam menjadi tantangan tersendiri. Indeks efektivitas pada aspek ini tercatat sebesar 80,2%, yang menunjukkan efektivitas yang cukup baik dalam pengelolaan kawasan.

Pengelolaan Usaha

Pada pengelolaan usaha berbasis hutan, kelompok tani hutan mulai mengembangkan usaha seperti budidaya lebah madu trigona dan pengolahan hasil pala. Namun, kendala utama dalam aspek ini adalah pemasaran produk yang masih terbatas. Skor rata-rata untuk pengelolaan usaha adalah 3,98, dengan indeks efektivitas sebesar 79,6%. Meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan produksi, tantangan pemasaran dan keterbatasan akses ke pasar luar masih menjadi hambatan besar.

Hubungan Antar Variabel

Hasil analisis menunjukkan hubungan signifikan antara penguatan kelembagaan dengan keberhasilan pengelolaan kawasan dan usaha berbasis hutan. Pengelolaan kelembagaan yang baik memperkuat struktur organisasi, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memfasilitasi pengelolaan kawasan hutan yang lebih baik. Selain itu, pengelolaan kawasan yang efektif mendukung keberlanjutan usaha berbasis hutan dengan memanfaatkan potensi sumber daya hutan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Meskipun demikian, kendala dalam pemasaran produk dan kurangnya sarana promosi masih menjadi faktor penghambat utama.

Pembahasan Teori dan Kerangka Pemikiran

Penelitian ini mengacu pada teori-teori pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan yang diungkapkan oleh

Suwandi dan Kartika (2018), yang menekankan pentingnya kelembagaan yang kuat dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan. Selain itu, penelitian ini juga mendukung pandangan dari Suharti et al. (2017) yang menyatakan bahwa peran penyuluh kehutanan sebagai fasilitator dan edukator sangat mempengaruhi keberhasilan program perhutanan sosial. Teori ini tercermin dalam hasil penelitian yang menunjukkan hubungan positif antara pendampingan penyuluh dengan peningkatan kemampuan kelompok dalam pengelolaan hutan.

Tabel 1. Indeks efektivitas peran penyuluh

Kriteria Penilaian	Indeks Efektivitas (%)	Tingkat Efektivitas
Kelola kelembagaan	82	Sangat efektif
Kelola Kawasan	80,2	Cukup efektif
Kelola Usaha	79,6	Cukup efektif

Sumber : Data Primer diolah, 2024



Gambar 1. Efektivitas Pendamping Penyuluh Kehutanan

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran penyuluh kehutanan dalam pendampingan penerima persetujuan pengelolaan perhutanan sosial di KTH Ake Guraci sangat efektif, terutama dalam aspek pengelolaan kelembagaan, kawasan, dan usaha berbasis hutan. Efektivitas pendampingan pada masing-masing aspek mencapai tingkat yang cukup tinggi, dengan skor tertinggi pada pengelolaan kelembagaan (82%). Meskipun demikian, tantangan utama masih terletak pada pemasaran produk hasil hutan dan diversifikasi jenis bibit untuk rehabilitasi lahan.

Saran

Untuk meningkatkan efektivitas program perhutanan sosial, disarankan agar penyuluh kehutanan lebih fokus pada peningkatan kapasitas dalam hal diversifikasi bibit dan strategi pemasaran produk. Peningkatan pelatihan bagi penyuluh dan anggota kelompok tani hutan sangat penting untuk mengatasi tantangan ini. Selain itu, peningkatan infrastruktur untuk

mendukung kegiatan usaha berbasis hutan dan penguatan jaringan pemasaran juga perlu diperhatikan untuk mendukung keberlanjutan program.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama pelaksanaan penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

REFERENSI

- BPS, 2018. Provinsi Maluku Utara dalam Angka 2018 ISSN : 235, 1–374
- Dewi, S. (2017). *Strategi Pengelolaan Hutan Sosial dalam Konteks Perhutanan Sosial di Indonesia*. Jurnal Kehutanan, 13(2), 12-18.
- Fitria, S. (2017). *Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dalam Program Perhutanan Sosial*. Jurnal Lingkungan, 5(4), 234-240.
- Lestari, P., & Rachman, A. (2020). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Hutan, 19(3), 200-215.
- Usman, A. et al. (2019). *Efektivitas Program Perhutanan Sosial di Indonesia*. Jurnal Perhutanan, 24(1), 30-40.